

DIALOG TEORI KONFLIK DIALEKTIKA-FUNGSIONAL

Meneropong Dinamika Sidang Itsbat di Indonesia

Nihayatur Rohmah

Institut Agama Islam Ngawi
nihayaturrohmah@yahoo.co.id

Abstract: *The difference in starting and becoming a hijriya month seems to be a question that does not go away. Whether we realize it or not, these things are part of the life of this nation. Therefore, an understanding of the root of existing problems can be helpful in determining attitudes. Determination of the 1st of Ramadan has become a tradition in this country will be decided by the government through Itsbat assembly of Islamic mass organizations in the ministry of Religion. The problem of hisab rukyat in terms of determining the beginning of the month of Qamariyah-especially Ramadan, Syawwal and Dzulhijjah-syndrome raised numbers, sometimes even inflaming the evil permutations that tore the fabric of ukhuwwah Islamiyyah. Government efforts through the trial basically rests on the efforts to achieve uniformity, prosperity and unity of Indonesian Muslims. In 2012 Muhammadiyah provides a firm stance that will not be able to oblige it with a variety of reasons between belief and belief between Muhammadiyah and the Government. From that fact, according to Lewis A Coser the conflict stems from an imbalance (imbalance) in the overall sosial system, the imbalance that causes splits (plague); this split inspires the emergence of the international (temporary integration); it is this temporal system that causes the structure to increase flexibly; this flexible structure then overcomes these imbalances through conflict; and reveals the highest level of adaptability in circumstances.*

Keywords: *Conflict, Itsbat Assembly, Imbalance*

PENDAHULUAN

Sudah umum diyakini, bahwa tidak ada pemikiran yang lahir dari ruang hampa. Artinya, tidak seorangpun yang bisa mengkonstruksi pemikirannya tanpa terlebih dahulu menyerap sekian banyak arus pemikiran pada zamannya. Arus pemikiran tersebut tidak hanya potongan-potongan dialektika yang memang hadir bersamaan dengan adanya realitas sosial. Namun juga terkait dengan pemikiran yang datang dari masa lalu atau masa kini yang berasal dari kebudayaan dari luar dan ikut bergumul serta berinteraksi dengan lokalitas dan kekinian yang disebut sebagai wacana.

Ta'aruf dengan Para Sosiolog Beserta Teori Konfliknya

Dalam esainya yang berjudul “*conflict*”, George Simmel (1995) berpandangan bahwa konflik merupakan bentuk dasar dari adanya interaksi. Bentuk dasar tersebut dapat dilihat dari gambaran dasarnya, antara lain persebaran hierarkis para anggota masyarakat dalam strata sosial yang berbeda-beda mencerminkan perbedaan dalam



memperoleh sumber-sumber yang bernilai; kepentingan yang saling bertentangan antar kelompok yang berbeda-beda dan kelas sosial dalam masyarakat; kemampuan kelompok dominan untuk mempertahankan dominasinya dengan “menjajah” kelompok lain.

Gambaran di atas mengandung pesan bahwa konflik tidak selalu berimbas pada terjadinya perubahan sosial, tetapi juga memberikan perhatian pada proses dimana stabilitas sosial itu dipertahankan. Upaya mempertahankan stabilitas dapat mendorong segenap elemen dalam masyarakat untuk bersatu. Maka, konflik berkaitan erat dengan proses yang mempersatukan kehidupan sosial dan bukanlah lawan persatuan. Lawan persatuan adalah ketidakterlibatan (*non-involvement*), dimana dalam suatu system tidak terjadi interaksi timbal balik.¹

Menjadi wajar jika segenap sosiolog memiliki perspektif yang berbeda tentang konflik. Ada yang berpendapat bahwa konflik dalam masyarakat bersifat abnormal sehingga menyebabkan ketegangan dan berimplikasi pada runtuhnya system yang ada. Pendapat lain mengatakan bahwa konflik tidak selamanya bersifat sifungsi, melainkan juga berfungsi positif. Teori-teori tersebut bukan tidak mungkin untuk dikombinasikan maka dalam tulisan ini penulis berupaya untuk memaparkan sintesis atas teori konflik Dialektika nya Ralf Dahrendorf dan teori konflik Fungsionalnya Lewis A. Coser.

TEORI KONFLIK DIALEKTIKA RALF DAHRENDORF

Ralf Dahrendorf adalah ahli sosiologi asal Jerman. Ia lahir tahun 1929. Semasa muda ia mengalami bangkitnya Nazisme. Sesudah perang dunia II, Dahdenrof menjadi sangat terlibat dalam masalah politik di Jerman Barat. Selain karirnya sebagai kaum akademisi, ia juga menjadi anggota perlemen Jerman Barat. Pengaruh Akademisnya tidak hanya terbatas di Jerman, namun ia juga ditunjuk menjadi Direktur *London Schoo; of Economics*.

Secara umum, Dahdendorf menolak tekanan kaum fungsionalis pada aspek integrasi, nilai, consensus normatif dan stabilitas. Menurutnya, meluasnya konflik sosial didasarkan pada oposisi kepentingan kelas yang juga dapat melahirkan perubahan sosial. System tidak selamanya terintegrasi, harmonis dan saling memenuhi tetapi ada wajah laun yang memperlihatkan konflik dan perubahan.²

Munculnya teori konflik dialektika Dahrendorf terinspirasi dari pemikiran Karl Marx, sehingga asumsi yang digunakan sebagai landasan adalah sebagai berikut;

- Relasi sosial diselubungi oleh konflik kepentingan
- Secara sistematis, system sosial memunculkan konflik
- Konflik sebagai keniscayaan dalam system sosial
- Konflik dimanifestasi oleh kepentingan dua belah pihak (*bipolar*)
- Konflik berkaitan dengan distribusi sumberdaya langka utamanya kekuasaan
- Konflik sebagai sumber utama perubahan dalam system sosial.

¹ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik-Modern* (Jakarta; PT. Gramedia, 1986), 269.

² Ibid, 183.

Dahrendorf mengakui bahwa tekanan teoritisnya pada konflik dan perubahan sosial merupakan suatu perspektif mengenai kenyataan sosial yang kurang berimbang. Maka menurutnya teori konflik dan fungsionalisme harus dikombinasikan, sehingga lebih komprehensif. Dahrendorf meringkas asumsi teori fungsionalis dan teori konflik sebagai berikut;³

Teori Fungsional;

- Setiap masyarakat merupakan suatu struktur elemen-elemen yang secara relative mantap dan stabil.
- Setiap masyarakat merupakan suatu struktur elemen-elemen yang terintegrasi dengan baik.
- Setiap elemen masyarakat mempunyai fungsi, yakni memberikan sumbangan pada bertahannya masyarakat sebagai suatu system.
- Setiap struktur sosial yang berfungsi didasarkan pada suatu consensus nilai di antara para anggotanya.

Teori Konflik;

- Setiap masyarakat kapan saja tunduk pada proses perubahan sosial yang ada di mana-mana.
- Setiap masyarakat kapan saja memperlihatkan perpecahan dan konflik sosial, konflik sosial ada di mana-mana.
- Setiap elemen masyarakat menyumbang disintegrasi dan perubahan.
- Setiap masyarakat didasarkan pada paksaan dari beberapa anggotanya atas orang lain.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa salah satu variabel penting dalam model Dahrendorf yang mempengaruhi derajat kekerasan dalam konflik kelas adalah tingkat dimana konflik itu secara eksplisit diterima dan diatur. Pengaturan konflik ini didasarkan pada pengakuan yang eksplisit tentang kenyataan dan kebenaran adanya konflik. Artinya, kedua belah pihak dilihat sebagai pihak yang memiliki kepentingan yang bertentangan secara sah. Pengaturan konflik ini juga menuntut pembentukan kelompok kepentingan yang terorganisasi dan ditegakkannya kerangka bersama untuk merembuk perbedaan-perbedaan itu.

TEORI KONFLIK FUNGSIONAL LEWIS A. COSER.

Lewis A. Coser mengatakan bahwa konflik itu bersifat fungsional (baik) dan disfungsional (buruk). Prioritas Coser pada sisi fungsional konflik dimana konflik dapat menyumbangkan interaksi dan adaptasi kelompok, ketahanan dan kekuatan system sosial. Maka, perhatian teori konflik diarahkan pada peningkatan-bukan kemerosotan-dan adaptasi atau penyesuaian, baik dalam hubungan sosial yang spesifik maupun pada kelompok secara keseluruhan. Dengan demikian, konflik tidak diabaikan karena menyebabkan efek negatif. Jadi secara Umum, Coser hendak memperlihatkan bahwa konflik tidak harus merusakkan atau bersifat disfungsional untuk system dimana konflik

³ Ralf Dahrendorf, *Class dan Class Conflict in Industrial Society* (Stanford: Stanford University Press, 1959), 161-162.

itu terjadi, melainkan bahwa konflik itu dapat mempunyai konsekuensi-konsekuensi positif atau menguntungkan system itu.⁴

Dalam *The Function of Sosial Conflict* disebutkan bahwa permusuhan di dalam konflik membantu fungsi-fungsi positif, sepanjang konflik itu dapat mempertahankan perpecahan kelompok dengan cara menarik orang-orang yang sedang dalam konflik. Jadi konflik dipahami sebagai suatu alat yang berfungsi untuk menjaga kelompok sepanjang dapat mengatur system-sistem hubungan.⁵ Konflik bersifat alamiah, individu-individu dalam masyarakat tidak hanya sekedar mau untuk melibatkan diri dalam konflik, tetapi mereka juga bersemangat untuk berkonflik sehingga konflik juga dapat mendorong adanya persatuan.

Jenis konflik yang menimpa sebuah system sosial, berpotensi untuk memberikan fungsi positif terhadap system tersebut. Fungsi konflik yang positif mungkin paling jelas dalam dinamika inter-kelompok (*in-group*) versus hubungan antar kelompok (*out-group*). Kekuatan solidaritas internal dan integrasi kelompok dalam itu bertambah tinggi karena tingkat permusuhan atau konflik dengan kelompok luar bertambah besar, semakin tinggi tekanan semakin besar konflik. Selain itu konflik internal dapat memperkuat kekompakan internal. Jadi, persepsi terhadap ancaman penting bagi penguatan suatu kelompok. Karena kelompok yang tidak terancam konflik dari kelompok luar, tekanan yang kuat pada kekompakan, konformitas, dan komitmen terhadap kelompok itu mungkin berkurang.

PERKEMBANGAN ILMU FALAK DI INDONESIA

Pembahasan Ilmu Falak terkait dengan persoalan ibadah. Kajian ilmu falak adalah penentuan awal waktu shalat, arah kiblat, awal bulan Qamariyah dan gerhana. Ilmu falak merupakan sebuah sains yang dikembangkan oleh umat Islam. Ia mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan sains. Dalam sains, kebenaran suatu teori bersifat relative. Sebuah teori itu dianggap benar sampai datang teori baru yang meruntuhkannya, sehingga teori yang lama tadi digantikan dengan teori yang baru. Teori yang baru inipun akan bertahan sampai datang teori yang dapat meruntuhkannya dan seterusnya, begitulah perkembangan sains.

Sejarah perkembangan ilmu falak di Indonesia bersifat dinamis. Saat dunia Islam memasuki periode modernnya pada awal abad ke-20, Ilmu Falakpun bersentuhan dengan kemoderenan; ilmu pengetahuan yang berasal dari Barat. Teori-teori lama yang sudah *out of date* dipertanyakan keabsahannya dan lalu ditinggalkan, digantikan dengan penemuan baru yang lebih sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam perhitungan awal bulan Qamariyah misalnya, sampai awal abad ke-20, di dunia Islam umumnya berkembang metode hisab yang belakang hari diidentifikasi sebagai metode *hisab hakiki taqribi* yang perhitungannya masih berpatokan pada asumsi Bumi sebagai pusat tatasurya atau biasa disebut dengan teori Geosentris.

Menurut T Djamaluddin (2008) bahwa teori Heliosentris (Matahari sebagai Pusat Tatasurya) yang selama ini dipegangipun kini tidak tepat lagi, karena Matahari bukanlah

⁴ Lewis A Coser, *The Function of Social Conflict* (Newyork: Free Press, 1956), 8

⁵ Ibid, 39

pusat alam semesta, karena dalam tinjauan alam semesta skala besar (kajian kosmologi) kita tidak mengenal adanya pusat alam semesta.⁶ Hal ini menunjukkan pengetahuan manusia tentang misteri alam semesta ini belum banyak diketahui hingga kini. Demikianlah perkembangan sains yang dinamis.

Ilmu falak memiliki dua dimensi. *Pertama*, bahwa ia merupakan sains yang dikembangkan di kalangan umat Islam. Dalam perkembangan sains, tentu saja ia mengikuti aksioma dalam sains. *Kedua*, fokus kajiannya adalah masalah ibadah. Permasalahan ibadah adalah salah satu bagian dalam kajian fiqh. Dalam kajian fiqh terdapat beragam pemahaman dan perbedaan pendapat para Ulama. Khazanah tentang keberagaman dan perbedaan di kalangan ulama itu dikenal dengan *ikhtilaf al fuqaha'* atau *khilafiyah*.

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, *ikhtilaf* telah terjadi semenjak Rasulullah masih hidup. Namun perbedaan pendapat di kalangan para sahabat tersebut dapat segera diselesaikan dengan mengembalikannya kepada Rasul. Setelah Rasul wafat, masa para Sahabat juga banyak terjadi perbedaan pendapat, demikian pula pada masa Tabi'in dan generasi berikutnya.

Persoalan *ikhtilaf* itu tercakup dalam permasalahan ijtihadiyah dan ijtihad itu hanya boleh dilakukan pada perkara *fiqhiyah furu'iyah*, yakni terletak pada masalah-masalah yang bersifat *dzanni* bukan masalah *qath'i*.

Umat Islam sampai saat ini masih berbeda-beda dalam menentukan awal bulan Qamariyah. Perbedaan cara itu mengakibatkan perbedaan pula dalam memulai peribadatan-peribadatan tertentu, yang paling menonjol adalah perbedaan dalam memulai puasa Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha. Perbedaan tersebut disebabkan oleh dua hal pokok yaitu dari segi penetapan hukum dan kedua segi system dan metode perhitungannya.

Penetapan hukum awal bulan qamariyah di Indonesia dapat dibedakan menjadi empat kelompok besar, yakni: pertama, kelompok yang berpegang pada rukyat. Kelompok ini melakukan hisab hanya sebagai alat bantu guna suksesnya rukyah. Kedua, kelompok yang memegang ijtima' sebelum Matahari terbenam. Ketiga, kelompok yang memandang bahwa ufuk hakiki sebagai kriteria untuk menentukan *wujudul hilal*. Dan keempat, kelompok yang berpegang pada kedudukan hilal di atas ufuk mar'i, yaitu ufuk yang dapat dilihat langsung oleh mata kepala sebagai kriteria dalam menentukan masuknya awal bulan qamariyah.⁷

TRADISI SIDANG ITS BAT PEMERINTAH RI

Persoalan hisab rukyat dalam hal penentuan awal bulan Qamariyah-terutama bulan Ramadhan, Syawwal dan Dzulhijjah-seringkali memunculkan perbedaan, bahkan kadang menyulut permusuhan yang mengoyak jalinan ukhuwwah Islamiyyah. Berpuluh-puluh tahun sudah umat Islam Indonesia terjebak dalam perdebatan tiada akhir, tentang

⁶ Gunawan Admiranto, *Menjelajah Bintang Gakaksi dan Alam Semesta*, (Jogjakarta: Kanisius, 2009), 1-2.

⁷ Departemen Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Islam, tt), 34.



penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha. Semakin lama bukan semakin mendekati titik temu, tetapi malah semakin menjauh. Upaya mengatasi dilema yang tak berkesudahan. Upaya pemerintah melalui sidang itsbat pada dasarnya berpijak pada upaya tercapainya keseragaman, kemaslahatan dan persatuan umat Islam Indonesia. Pemerintah dengan berdasar pada kaidah *“hukm al-hakim ilzamun wa yarfa’al-khilaf”* (keputusan hakim/pemerintah itu mengikat dan menyelesaikan perbedaan pendapat). Keputusan yang diambil pemerintah, sebagai upaya untuk mengakomodir semua madzhab semestinya dapat diterima dan diikuti oleh semua pihak. Namun dalam tataran realitas, ternyata masing-masing pihak mengeluarkan keputusannya sendiri-sendiri. Sudah saatnya menanggalkan egoisme ormas, egoisme partai dan aliran demi kepentingan persatuan umat. Sehingga sidang Itsbat yang diharapkan bisa menjadi forum untuk mencari solusi bersama pun, kini terkesan sudah tak berdaya.⁸

Dalam perkembangannya saat ini, ternyata penentuan awal Ramadhan dan hari raya idul fitri dan Adha tidak lagi dapat dikatakan mudah. Dari segi teknis ilmiah sebenarnya penentuannya memang mudah karena merupakan bagian ilmu eksakta. Tetapi dalam penerapannya di masyarakat susah, karena menyangkut masalah-masalah non eksakta seperti perbedaan madzhab hukum (ex; ada yang menganggap tidak sah cara hisab), perbedaan matla’ (daerah berlakunya suatu kesaksian hilal), dan kepercayaan kepada pemimpin ummat yang tidak tunggal.

Perbedaan dalam mengawali dan mengakhiri bulan hijriyah seakan menjadi pertanyaan yang tidak kunjung usai. Disadari atau tidak, permasalahan tersebut merupakan bagian dari kehidupan bangsa ini. Oleh karena itu pemahaman terhadap akar permasalahan yang ada dapat membantu dalam menentukan sikap.

HEGEMONI KELOMPOK KEAGAMAAN ATAS KUASA PEMERINTAH

Persoalan penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah bukan sekadar masalah penetapan waktu ibadah. Ada cita-cita besar yang ingin diwujudkan umat Islam: mewujudkan kalender Islam yang mapan. Di Indonesia, otoritas pemerintah belum sepenuhnya disepakati. Saat ini otoritas pimpinan ormas Islam masih lebih dipercaya. Batas wilayah secara umum sudah disepakati yaitu batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), walau ada yang menginginkan batas wilayah global (namun tanpa memberikan konsepnya). Masalah kriteria makin menampakkan perbedaan antar-ormas Islam, khususnya antara Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Persatuan Islam (Persis).

Tak ubahnya dengan kalender/penanggalan lain, kalender Hijriyah adalah realitas yang diproduksi oleh segelintir elite (*baca: kelompok orang penting yang berkuasa dalam masyarakat*). Posisi publik umat dalam pertalian ini adalah konsumen dari-dan mengamalkan saja –kalender yang dihasilkan oleh elite mereka. Wajah kalender hijriyah di suatu negeri, dengan demikian adalah cermin bening dari ihwal para elite mereka.

⁸ Nihayatur Rohmah, Makalah Orasi Ilmiah: *Membaca Pemikiran Elite NU (Refleksi dalam Menyikapi Perbedaan Penetapan Hari Raya)*, disampaikan pada Rapat Senat Terbuka Wisuda ke IV STAI NGAWI, 26 September 2015.

Kesatuan kalender hijriyah tiada lain adalah buah dari kesatuan otoritas, dan otoritas yang dimaksud dalam level Negara tiada lain adalah Ulil Amri.

Dalam konteks fiqih formal NU yang tertuang dalam hasil-hasil Bahsul Masail sejatinya telah meletakkan Ulil Amri (*baca: Pemerintah*) pada posisi yang otoritatif. Namun dalam implementasinya, kendati sudah menjadi bagian dalam sidang-sidang itsbat pemerintah, NU sejak awal dasawarsa 90-an mulai mentradisikan penerbitan pengumuman dengan label “*ikhbar*” yang content-nya ternyata bukan informasi tentang hasil rukyat semata, melainkan dilengkapi juga dengan penetapan jatuhnya awal bulan hijriyah. Ikhbar yang dikeluarkan NU itu bahkan kadang berselisih dengan itsbat pemerintah. Hingga sekarang NU masih terus menerbitkan ikhbar-ikhbar awal bulannya. Namun, dalam Sembilan tahun terakhir (2007-2015) tidak ada satupun ikhbar NU yang berselisih dengan istbat pemerintah. Kendati demikian, pada bulan-bulan primadona (*baca: Ramadhan, Syawwal, Dzulhijjah*), NU tetap dibaca sebagai faktor potensial yang bisa membikin retak kalender hijriyah di Indonesia. Di tengah makin kuatnya arus obsesi umat atas terwujudnya unifikasi kalender hijriyah di Indonesia, dan mengingat peran elite dalam realitas kalender, adalah penting untuk membedah apa yang dipikirkan elite NU mengenai pokok tersebut.

SEBUAH SINTESIS; TEORI KONFLIK DIALEKTIKA DAN KONFLIK FUNGSIONAL

Penetapan tanggal 1 Bulan Ramadhan telah menjadi sebuah tradisi di negeri ini akan diputuskan oleh pemerintah RI melalui sidang Itsbat dengan melibatkan ormas-ormas Islam di Kementerian Agama. Namun, Masih teringat dalam benak umat Islam di Indonesia bahwa Muhammadiyah memberikan sikap tegas tidak akan menghadiri sidang itsbat tersebut dengan alasan adanya faktor perbedaan keyakinan antara Muhammadiyah dan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama RI. Muhammadiyah merasa tidak perlu menghadiri rapat tersebut karena alasan ini keyakinan yang tidak boleh diintervensi oleh pemerintah. Jadi untuk tahun-tahun yang akan datang Muhammadiyah juga tidak diintervensi dan menyatakan tidak ikut sidang. Din Syamsuddin menilai bahwa sidang Istbat yang digelar hanya basa basi karena pemerintah tidak mengakomodasi aspirasi-aspirasi dari ormas keagamaan yang ada. Pemerintah dalam itsbatnya hanya menentukan keputusan secara sepihak (Kompas, 19 Juli 2012).

Dari fakta tersebut, menurut Lewis A Coser konflik bermula dari ketidakseimbangan (*imbalance*) dalam system sosial keseluruhan, ketidakseimbangan itu menyebabkan perpecahan (*outbreak*); perpecahan ini menginspirasi kemunculan integrasi temporal (*temporally integration*); integrasi temporal inilah yang menyebabkan struktur system meningkat menjadi fleksibel; fleksibilitas struktur ini kemudian menyelesaikan ketidakseimbangan tersebut melalui konflik; dan mengungkapkan level tertinggi terhadap adaptabilitas dalam merubah keadaan.⁹

Catatan yang diberikan Coser adalah semakin intim hubungan semakin besar pula perasaan yang dicurahkan. Maka semakin besar pula kecenderungan untuk menekan perasaan bermusuhan daripada mengungkapkannya. Ini kemudian dapat disimpulkan

⁹ Jonathan H Turner, *The Structure of Sociological Theory* (Homewood: Dorsey Press, 1975), 109.



bahwa perasaan-perasaan bermusuhan itu menggunung. Setiap peristiwa yang menekan menambah intensitas permusuhan. Bahaya akan solidaritas hubungan akan lebih besar pula dan semakin besar pula keterlibatan atau intensitas emosional para anggotanya satu sama sama lain. Kalau keterlibatan emosional para anggotanya sudah meninggi, berakhirnya hubungan itu mungkin dipercepat dengan meledaknya konflik secara tiba-tiba dan parah dimana ketegangan itu menggunung sejak lampau dan tiba-tiba meledak. Atau sebenarnya dari konflik yang ada tersebut, mengelakkan perasaan bermusuhan itu dari sumber yang sebenarnya dan mengembangkan suatu saluran alternative untuk mengungkapkannya, dimana dorongan-dorongan agresif atau permusuhan dapat diungkapkan dengan cara yang tidak mengancam dan merusak solidaritas.

Sikap alternative kedua ini kemudian mewujudkan pada sikap Muhammadiyah yang menyatakan diri siap memenuhi undangan Kementerian Agama pada sidang istbat penentuan awal Ramadhan 1435 H (26 Juni 2014). Hal ini berbeda dari sikap Muhammadiyah pada tahun sebelumnya yang menolak hadir. Hal ini dilakukan oleh Yunahar Ilyas selaku Ketua PP Muhammadiyah yang baru mendapat ajakan khusus dari Menteri Agama yang baru Lukman Hakim Saifuddin agar Muhammadiyah turut serta dalam sidang Istbat. Syarat yang diajukan Muhammadiyah adalah meminta agar sidang istbat tidak disiarkan secara terbuka dan Menteri Agama cukup mengadakan konferensi pers terkait hasil sidang istbat.

Dahrendorf mengatakan bahwa konflik antara tingkatan-tingkatan hierarki mengenai penyebaran otoritas. Dan model ini paling cocok untuk menangani konflik dalam organisasi birokratis atau masyarakat yang diorganisasi secara birokratis. Coser menambahkan bahwa konflik dapat mempunyai fungsi positif untuk suatu kelompok atau masyarakat daripada hanya merusak solidaritas dan komitmen. Secara parsial keduanya bertemu di titik kulminasi bahwa konflik memberikan fungsi kala konflik itu diakui dan dihadapi secara terbuka oleh pihak-pihak yang berkonflik.

Melihat kecenderungan masing-masing dari teori konflik dialektika dan Fungsional maka kemudian muncul usaha untuk mensintesis kedua teori tersebut. Perlu ada sintesis yang berupaya untuk mengurangi kesenjangan kedua teori yaitu dengan cara mempertemukan kedua skema teori sehingga lebih bisa merespon fakta konflik dalam masyarakat.

Dahrendorf dan Coser masing-masing memiliki preposisi terkait konflik. Dahrendorf mengatakan bahwa semakin intens konflik terjadi, maka semakin besar perubahan dan reorganisasi struktural yang akan dihasilkan; semakin keras konflik terjadi, semakin besar peringkat perubahan dan reorganisasi struktural.

Sedangkan Coser mengimbuhkan bahwa semakin intens konflik terjadi dan semakin terdiferensiasi pembagian kerja masing-masing kelompok, semakin mungkin masing-masing untuk memusatkan struktur pembuatan keputusan; semakin intens konflik yang terjadi dan semakin konflik dipahami akan mempengaruhi masing-masing kelompok, semakin besar konflik mendorong terciptanya solidaritas struktural dan ideologis antara anggota kelompok yang bertikai; semakin intens sebuah konflik semakin jelas batas-batas antara kelompok yang bertikai.

PENUTUP

Dalam melakukan sintesis atas beberapa asumsi, terdapat kesulitan karena diantaranya harus menyelaraskan beberapa perspektif dengan segala kelebihanannya. Upaya Sintesis dialektika-fungsional ini tidaklah berupaya untuk membuat format teori, melainkan *ad hoc exercise* dengan menciptakan teori yang koheren sehingga preposisi dari Dahrendorf dan Coser ini diberikan secara proporsional. Dengan demikian masing-masing teori dapat diuji dan Sosiologi ini menduduki tempatnya dalam menggarap manusia sebagai manusia, dimana dinamika diciptakan manusia dan kembali-diantaranya-kepada manusia juga. □

DAFTAR PUSTAKA

- Admiranto, Gunawan. (2009). *Menjelajah Bintang Galaksi dan Alam Semesta*, Jogjakarta: Kanisius.
- Coser, Lewis A. (1959). *The Function of Sosial Conflict*, Newyork: Free Press.
- Dahrendorf, Ralf. (1959). *Class dan Class Conflict in Industrial Society*. Stanford: Stanford University Press.
- Departemen Agama RI. (t.t). *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Islam.
- Johnson, Doyle Paul. (1986). *Teori Sosiologi Klasik-Modern*, Jakarta; PT. Gramedia.
- Turner, Jonathan H. (1975). *The Structure of Sociological Theory*, Homewood: Dorsey Press.
- Rohmah, Nihayatur. (2015). Makalah Orasi Ilmiah: *Membaca Pemikiran Elite NU (Refleksi dalam Menyikapi Perbedaan Penetapan Hari Raya)*, disampaikan pada Rapat Senat Terbuka Wisuda ke IV STAI NGAWI, 26 September 2015.

